

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT JUMLAH PENDUDUK MISKIN PER KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2017

Dwi Asmara Pandu Putra

Email : Pandu4977@gmail.com

Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Jumlah Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2010-2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan metode kuantitatif dengan regresi data panel dan metode estimasi yang terbaik adalah *Fixed Effect Model* menggunakan alat bantu berupa *software e-views 9*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel IPM dan variabel Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci : *Pertumbuhan PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum, Jumlah penduduk per kabupaten/kota, dan tingkat kemiskinan*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat kinerja perekonomian baik ditingkat nasional maupun regional (daerah). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian yang meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang

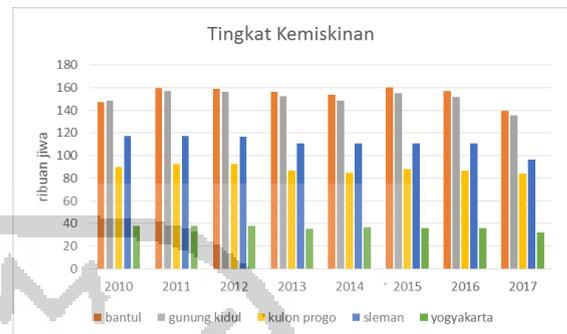
suatu negara tidak hanya didukung oleh kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan mutu modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi. Pembangunan manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan beberapa aspek penting bagi kehidupan manusia, yaitu usia hidup, pendidikan, dan standar hidup layak.

layak bagi seluruh rakyat yang pada selanjutnya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk di Indonesia. Salah satu pembangunan nasional adalah

menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Masalah dari kemiskinan memang merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dimana dilaksanakan secara terpadu (M.Nasir, Dkk 2008).

Dalam arti luas, Chambers (dalam Chriswardani Suryawati,2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi suatu darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*deppendence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan merupakan isu permasalahan bagi setiap negara di dunia ini, khususnya bagi negara berkembang seperti di indonesia. Di indonesia, kemiskinan masalah yang sangat besar tidak hanya karena tendensinya yang semakin naik, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan elektabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sejak indonesia merdeka konsep trilogy pembangunan dengan teori trickle down effect yang diambil oleh indonesia yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sementara dan menghasilkan disparstisan yang tinggi antar golongan kaya dan miskin.

Lalu selanjutnya dapat dilihat grafik 1.3 tingkat jumlah penduduk miskin per kabupaten/kota di D.I Yogyakarta sebagai berikut:



Pada grafik 1.3 menunjukkan bahwa tingkat jumlah penduduk miskin tiap tahunnya yang paling tinggi berada di daerah kabupaten bantul. Sedangkan jumlah penduduk miskin dibawah kabupaten bantul ialah di daerah kabupaten gunung kidul. Selanjutnya tingkat jumlah penduduk miskin paling rendah ialah di daerah kota yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penduduk miskin di seluruh kabupaten/kota terjadi tidakstabilan.

Kajian Pustaka

Novita Dewi (2017) universitas riau, pekanbaru, indonesia dalam penelitiannya tentang “ Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau “.Dari hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis pertama adalah kemiskinan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Analisis data hipotesis kedua adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap

indeks pembangunan manusia. Jadi kesimpulan nya dalah tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Desi Yulianti (2013) universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penelitian nya tentang “ Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Upah terhadap Kemiskinan di provinsi DIY periode tahun 2007-2013 (dalam perspektif ekonomi syariah) “. Dari hasil analisis menunjukan bahwa hipotesis pertama adalah Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan. Hipotesis kedua adalah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hipotesis ketiga adalah Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Yang terakhir hipotesis keempat adalah upah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Jadi kesimpulan nya adalah indeks pembangunan manusia dan upah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Riza Firdhania, Fivien Muslihatiningsih (2017) Universitas Jember dalam penelitian nya tentang “ Faktor – Faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember “.Hasil yang

menunjukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Variabel inflasi, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Indek Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi mengalami positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Jadi secara simultan hasil analisis data menunjukan jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di kabupaten jember.

Siti Walida Mustamin (2017) Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penelitian nya tentang “ Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Kemiskinan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan “.Dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa hipotesis pertama belanja pemerintah secara langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh belanja pemerintah secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Hipotesis kedua adalah inflasi secara langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh inflasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan melalui

pertumbuhan ekonomi. Hipotesis yang ketiga adalah investasi secara langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh investasi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Hipotesis yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi secara langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan yang secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Dwi Puspa Hambarsari (2016) universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam penelitiannya tentang “ Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2004 – 2014 “. Hasil yang menunjukkan bahwa hipotesis pertama adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hipotesis kedua pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Yang terakhir hipotesis ketiga adalah inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Dahma Amar Ramadhan, Djoko Setiyadi (2017) Universitas Mulawarman Samarinda dalam penelitiannya tentang “ Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Samarinda “. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa hipotesis pertama adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hipotesis kedua Upah Minimum Kota berpengaruh signifikan terhadap pengangguran dan kemiskinan. Hipotesis ketiga adalah tingkat pendidikan berpengaruh langsung dan tidak signifikan dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Yulianita Ratna Dwihapsari (2017) Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam penelitiannya tentang “ Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia “ Dari hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Demikian pula inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Jadi kesimpulannya adalah pemerintah memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja sehingga mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Jolianus (2016) STKIP-PGRI Sumatra Barat dalam penelitiannya tentang “ Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemiskinan pada kabupaten/kota di provinsi sumatra barat dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening “. Dari hasil analisis

menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam variabel dependen yang kedua adalah PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, DAU berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah (2007) Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo dalam penelitiannya tentang “Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran: Pendekatan Jalur”. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa PAD, DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan dan pengangguran, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yang terakhir DAU tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Agus Pramono Seto (2018) Universitas Muhamadiyah Surakarta dalam penelitiannya tentang “Analisis Pengaruh Flypaper Effect, Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah

2010-2015”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yang memiliki pengaruh yang signifikan adalah variabel Jumlah Penduduk Miskin, Pengangguran, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan yang terjadi Flypaper Effect dari 30 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Blora.

Irhamni (2017) Universitas Negeri Yogyakarta dalam penelitiannya tentang “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 1986-2015”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk dan Pengangguran berpengaruh positif yang cukup signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Novri Silastri (2017) Fakultas Ekonomi Universitas Riau dalam penelitian ini tentang “Pengaruh Jumlah penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi”. Untuk mencari hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

menggunakan teknik analisis regresi bifilar linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Kemiskinan, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Landasan Teori

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang mencapai hidup yang layak. Selain itu kondisi yang dibawah standar kebutuhan minimum. Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah karena adanya kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan, minim nya lapangan kerja dan kurangnya kesempatan kerja yang mengakibatkan banyaknya pengangguran sehingga tingkat pendidikan dan kedehatan rendah.

b. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan ekonomi fisik misalnya penambahan produksi barang dan jasa maupun perkembangan infrastruktur di suatu daerah. Menurut Sukirno (2013;3) pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan dimana semakin tinggi

pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu tahun tertentu (tahun t) dapat ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$PE = \frac{p_t - p_{t-1}}{p_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

PE = Tingkat pertumbuhan ekonomi %

$PDRB_t$ = PDRB pada tahun t

$PDRB_{t-1}$ = PDRB pada tahun sebelumnya

Secara umum teori pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis didasarkan pada kepercayaan akan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ekonomi klasik merupakan teori yang dicetus oleh para ahli ekonomi yang hidup pada abad 18 hingga awal abad 20, para ahli ekonom tersebut antara lain adalah Adam Smith, David Ricardo dan W.A Lewis. Teori pertumbuhan ekonomi yang lain adalah teori pertumbuhan modern, karakteristik umum teori ini mengakui pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan sistem kegagalan sistem pasar bebas,

c. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang dihitung rata-rata sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pembangunan dalam pilihan-pilihan sebagai berikut

antara lain adalah indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 (X_1 + X_2 + X_3)$$

Keterangan :

X₁ = Indeks Harapan Hidup

X₂ = Indeks Pendidikan

X₃ = Indeks Standar Hidup (BPS,2017)

Indeks pembangunan manusia (IPM) suatu capaian dimana masyarakat dapat memperoleh hasil dari pembangunan dalam mendapatkan pendapatan, kesehatan, maupun pendidikan (BPS,2017)

IPM =

$$\sqrt[3]{\frac{100 \times I_p \times I_m \times I_n}{100}}$$

Berdasarkan konsep pembangunan manusia (ipm) oleh UNDP, adapun empat kriteria status dari pembangunan manusia yaitu:

- Tinggi : IPM > 80.0
- Menengah Atas : IPM antara 66.0 – 79.9
- Menengah Bawah : IPM antara 50.0 – 65.9
- Rendah : IPM < 50.0

d. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. Sementara otonomi daerah diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan aturan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang republik indonesia adalah tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efisien.

Rumus Dana Alokasi Umum yang akan dibentuk didasarkan atas pemikiran bahwa alokasi DAU akan diberikan kepada daerah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dengan potensi penerimaannya sendiri. Ini berarti bahwa besarnya kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah dinyatakan sebagai berikut:

Kebutuhan DAU = Kebutuhan Daerah – Potensi Penerimaan Daerah

Besarnya alokasi DAU ke suatu kabupaten/kota, dihitung dengan

Bobot kabupaten/kota bersangkutan dengan besarnya total dana DAU yang tersedia untuk kabupaten/kota. Total dana DAU untuk kabupaten/kota 90% dikalikan dengan 25% dari penerimaan dalam negeri nasional. Rumusnya dapat dilihat dibawah ini:

$$\text{Alokasi DAU suatu kabupaten/kota} = 90\% \times 25\% \times \text{PDN} \times \text{kabupaten/kota}$$

e. Jumlah Penduduk

Secara definisi jumlah penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis indonesia selama kurang lebih 6 bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan akan tetapi bertujuan menetap (BPS,2017). Sedangkan menurut said (2012;136), yang dimaksud dengan penduduk adalah jumlah orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Reverend Thomas Maltus pada tahun 1798 (Arsyad,2004; 223)

mengemukakan teorinya tentang hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi.

Dalam tulisannya yang berjudul *essay on the principle of population*, ia menjelaskan konsep hasil yang cenderung umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Disaat yang sama, hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan persediaan pangan yang hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena itu, pertumbuhan oersediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang cepat dan tinggi. Maka pendapat perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat konsisten yaitu pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup.

Metode Penelitian

Hasil Pembahasan

a. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	40.007942	(4,30)	0.0000
Cross-section Chi-square	71.993761	4	0.0000

Sumber : diolah evIEWS9

Ho: *Common Effect Model*

Ha: *Fixed Effect Model*

Dari hasil pengujian diatas pada tabel 4.5 diperoleh nilai probabilitas dari Cross Section F sebesar 0.0000 dengan begitu niali p-value < α (0,05), dapat

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan maupun berbagai publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan kombinasi dari *time series* dan *cross section*. Data *time series* dalam penelitian ini yaitu tahun 2010 sampai tahun 2017 dan data *cross section* yaitu 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

persamaan regresinya sebagai berikut:

$$KEM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 PENDUDUK_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Kemiskinan (KEM)
- i = Kabupaten/Kota DIY
- t = Waktu
- $\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien
- PDRB = Produk Domestik Regional Bruto
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- DAU = Dana Alokasi Umum
- Penduduk = Jumlah Penduduk
- e = Error term

diambil kesimpulan bahwa hasil dari uji chow adalah menerima Ha, sehingga model yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

b. Hasil Uji Housman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section			
random	160.031767	4	0.0000

Sumber: data diolah eviews9

Ho: *Random Effect Model*

Ha: *Fixed Efect Model*

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.6 diperoleh nilai statistic pada uji housman memiliki probabilitas 0.0000

dengan nilai p-value $< \alpha$ (0,05), dapat diambil kesimpulan bahwa Ha diterima, dengan kata lain Fixed Effect Model adalah model yang lebih baik digunakan daripada model Random Effect Model.

c. Hasil Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	200.4558	3.774785	0.0007	
(PDRB)	13.06817	2.111279	0.0432	Signifikan*
(IPM)	-2.276131	-3.243997	0.0029	Signifikan*
(DAU)	-3.07E-09	-0.140871	0.8889	Tidak Signifikan*
(PEND)	5.13E-05	6.276903	0.0000	Signifikan
R-Squared			0.957696	
Prob(Fstatistic)			0.000000	

*) dengan α 5%

Sumber: diolah data eviews9

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil dari regresi Fixed Effect Model diperoleh R^2 sebesar 0.957, menunjukkan bahwa variabel dependen Tingkat Jumlah Penduduk Miskin dapat dijelaskan oleh variabel independen jumlah PDRB, IPM, DAU dan jumlah penduduk sebesar 95%. Sementara itu sisanya yaitu sebesar 5% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain diluar model.

2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Berdasarkan hasil dari regresi diatas diperoleh nilai nilai Prob (F-statistic) $0.000000 < \alpha$ 5% maka dari hasilnya signifikan yang artinya terdapat pengaruh

antara variabel jumlah PDRB, IPM, DAU, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Daerah Istemwa Yogyakarta.

3. Uji Statistik t

Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setelah dilakukannya regresi didapatkan hasil pada tabel 4.7 didapatkan probabilitas jumlah PDRB sebesar $0.0432 < \alpha$ (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat jumlah penduduk miskin.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tabel 4.7 memiliki probabilitas

sebesar $0.0029 < \alpha (0.05)$, maka yang dapat diambil kesimpunnya adalah bahwa variabel IPM signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat jumlah penduduk miskin.

Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan hasil dari pengujian yang dilakukan pada tabel 4.7 memperoleh nilai probabilitas sebesar $0.08889 > \alpha (0.05)$, yang dapat diambil kesimpulan bahwa

variabel DAU berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap tingkat jumlah penduduk miskin.

Jumlah Penduduk (PEND) pada tabel 4.7 hasil dari pengujiannya memperoleh nilai probabilitas sebesar $0.0000 < \alpha (0.05)$, maka yang dapat diambil kesimpulan bahwa variabel PEND berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat jumlah penduduk miskin

Pada tabel 4.8 telah memperlihatkan konstanta masing-masing kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2017

Hasil *Cross Section effect*

No	Kabupaten/Kota	Effect	C	Konstanta
1	Kabupaten Bantul	90,5798	200,4558	291,0356
2	Kabupaten Gunung Kidul	21,4026	200,4558	221,8584
3	Kabupaten Kulon Progo	-87,78262	200,4558	112,67318
4	Kabupaten Sleman	92,1514	200,4558	292,6072
5	Kota Yogyakarta	-116,3512	200,4558	84,1046

Dapat diketahui dari tabel 4.8 bahwa wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kondisi Tingkat jumlah penduduk miskin berbeda-beda di setiap kabupaten/kota. Dari data 4.8 diatas dapat dilihat masing-masing konstanta. Diketahui bahwa tingkat jumlah penduduk miskin paling tinggi ada di kabupaten selman sebesar 292.6072. seperti diketahui bahwa jumlah penduduk paling tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kabupaten Sleman. Hal ini yang membuat kabupaten sleman paling miskin diantara kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan padat nya penduduk maka dapat mempengaruhi

tingkat pengangguran. Kemudian tingkat jumlah penduduk miskin terendah ada di kota Yogyakarta sebesar 84.1046, hal ini dikarenakan kota yogyakarta sebagai tempat destinasi pariwisata, hal tersebut dapat membuka lapangan kerja.

Pembahasan

1) Pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan PDRB menunjukkan angka positif dan signifikan sehingga berpengaruh terhadap tingkat jumlah penduduk miskin. Variabel pertumbuhan PDRB memiliki nilai koefisien regresi sebesar 13.06817 dan memiliki nilai

probabilitas sebesar 0.0432 dimana lebih kecil dari α 5%. Ketika pertumbuhan PDRB mengalami kenaikan maka tingkat jumlah penduduk miskin akan mengalami kenaikan sebesar 13.06%. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh wongdeshmiwati (2009) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi tingkat jumlah penduduk miskin. Semakin impresif pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunannya tingkat kemiskinan yang ada. Hal ini senada dengan penelitian lainnya yaitu Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk miskin. Sedangkan hasil penelitian saya berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh wongdesmiwati dan hermanto siregar. Hasil yang saya teliti ini signifikan tetapi positif artinya semakin meningkatnya PDRB maka semakin meningkatnya pula tingkat kemiskinan. Hal ini menurut analisis saya dikarenakan oleh lokasi dan waktu yang berbeda, sehingga hasilnya pun berbeda. Selain itu ada faktor lain ialah kesenjangan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang dikatakan oleh kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) Agus Heruanto yang dikutip melalui berita *yogyakarta, GATRAnews* menyatakan bahwa kesenjangan perekonomian antarwarga di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat setiap tahun. Hal ini berbanding balik dengan kondisi pembangunan yang terus berjalan di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut. Bukan hanya itu, kehadiran 150 perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata tidak

memberi dampak signifikan untuk menanggulangi kemiskinan.

2) Pengaruh IPM terhadap Tingkat Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/kota menunjukkan angka negatif dan signifikan sehingga berpengaruh terhadap tingkat jumlah penduduk miskin. Variabel dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -2.276131. dan nilai probabilitas yang dimiliki sebesar 0.0029 dimana lebih kecil dari α 5%. Hal ini menunjukkan bahwa berkurangnya tingkat kemiskinan karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat mengindikasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkatkan produktivitas kerja manusia. Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian Sofilda (2013), menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Papua. Hal ini dikarenakan oleh 3 dimensi IPM (Pendidikan, Kesehatan dan hidup layak) memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas manusia. Pendidikan memiliki kemampuan dalam menyerap teknologi dan mengembangkan kapasitas perkembangan pendidikan di setiap wilayah. Selain itu, kesehatan merupakan syarat mewujudkan produktivitas. Karena dengan kesehatan dan pendidikan dapat membantu mengurangi angka tingkat kemiskinan.

3) Pengaruh DAU terhadap Tingkat Kemiskinan

Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan angka negatif dan tidak signifikan sehingga tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Variabel

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-3.07E-09$ dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.8889 yang dimana lebih besar dari $\alpha 5\%$. Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya oleh Riry Isramiwarti, M. Rasuli dan Taufeni Taufik (2017) tentang pengaruh PAD, DAU, dan Jumlah penduduk terhadap kemiskinan yang menyatakan Tidak berpengaruhnya Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap penurunan tingkat kemiskinan ini dikarenakan Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana Alokasi Umum oleh daerah lebih banyak digunakan untuk Operasional Daerah melalui belanja daerah yang tidak produktif sehingga tidak memberikan efek terhadap kesejahteraan masyarakat.

4) Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan

Jumlah Penduduk menunjukkan angka positif dan signifikan sehingga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Variabel dari Jumlah Penduduk memiliki nilai koefisien regresi sebesar $5.13E-05$ dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang dimana lebih kecil dari $\alpha 5\%$. Hal ini dikarenakan kenaikan Jumlah Penduduk tidak dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain seperti pembangunan ekonomi. Dengan demikian, kenaikan Jumlah Penduduk justru akan menurunkan tingkat upah dan menambah beban perekonomian. Pertumbuhan penduduk yang cepat berkembang dapat mendorong efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga membuat pengurangan kemiskinan semakin jauh.

Implikasi

Dengan tidak meratanya pertumbuhan PDRB di beberapa daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka peran utama pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan upaya mengembangkan sektor-sektor seperti pertanian, industri dan pariwisata di kawasan yang sampai saat ini belum tersentuh.

Dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi, kedepannya pemerintah dapat mengembangkan sistem pendidikan dan kesehatan. Karena pendidikan dan kesehatan bagian dari syarat produktivitas atau kualitas manusia.

Dengan kenaikan tingkat jumlah penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat berpengaruh terhadap kemiskinan. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah dalam hal menurunkan laju pertumbuhan jumlah penduduk dengan lebih menggencarkan program KB bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ma'ruf & Latri Wihastuti (2008), "Pertumbuhan Ekonomi: Determinan dan Prospeknya", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol 9 No 1.
- Anis Setyawati & Ardi Hamzah (2007), "Analisis Pengaruh PAD, DAK, DAU dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol 4 No 2.
- BPS, 2010-2018. *DIY Dalam Angka*
- Dira Mita & Umaruddin Usman (2018), "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di

Provinsi Kepulauan Riau “, Jurnal Ekonomi Regional UNIMAL Vol 1 No 2.

Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun terakhir (Studi Kasus pada 33 Provinsi) “, Jurnal JIBEKA Vol 11 No 2.

Eka Pratiwi Lumbantoruan & Paidi Hidayat (2013), “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi –Provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi) “, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol 2 No 2.

Gamal Abdul Azis, Reny Rochaida & Warsilan (2016), “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun “, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen Vol 12 No 1.

I Putu Arya Finkayana, Made Heny Urmila Dewi (2016), “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Komposit IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali “, Jurnal Manajemen Vol 5 No.7

Jolianis (2016), “Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel *Intervening* “, Jurnal of Economic and Economic Education vol 4 No 2.

Muhammad Bhakti Setiawan & Abdul Hakim (2013), “Indeks Pembangunan Manusia “, Jurnal Ekonomi Vol 9 No 1

Muhammad Garibaldi & Paidi Hidayat (2013), “Analisis Hubungan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera utara “. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol 2 No 1.

Noor Zuhdiyaty (2017), “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi